

Mengapa Ketimpangan Distribusi Pendapatan Cenderung Tinggi?

KEMAJUAN ekonomi prinsipnya bukan hanya diukur dari sisi pertumbuhan ekonomi semata, sekalipun itu tetap menjadi penting dijadikan referensi dalam merumuskan kebijakan ekonomi. Dengan sendirinya diharapkan bahwa pertumbuhan ekonomi sedapat mungkin terus meningkat hingga mencapai double digit. Tapi rasanya pertumbuhan ekonomi double digit yang dialami oleh suatu negara masih cukup langkah, lain halnya di daerah sudah banyak melampaui 10 persen. Pertumbuhan ekonomi tinggi pun sesungguhnya tidaklah cukup, karena belum tentu memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel makro ekonomi lainnya. Meminjam istilah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawaty... high growth is not enough we need but high quality growth... Jika ditemukan ada daerah yang merasa berpuas diri karena pertumbuhan ekonominya cukup tinggi, apalagi membandingkan dengan tingkat nasional lebih rendah, sebaiknya jangan dijadikan sebagai ukuran keberhasilan, membandingkan pertumbuhan ekonomi regional dan nasional tidak relevan karena sumber pertumbuhan dan karakteristiknya berbeda.

Sama halnya membandingkan pertumbuhan ekonomi antar negara, maju dan berkembang tidak tepat. Umumnya negara-negara maju rata-rata pertumbuhan ekonominya antara 1 - 3 persen, sementara negara berkembang rata-rata 5 - 7 persen. Dengan sendirinya tidak dapat dijadikan perbandingan bahwa yang tumbuh di atas 5 persen lebih bagus daripada yang di bawah 3 persen, karena ukuran ekonominya berbeda. Terpenting dilihat bukan tingginya pertumbuhan tetapi efek yang ditimbulkan, setidaknya jika

kita lihat problem ekonomi yang dihadapi hari ini, yakni kemiskinan yang tinggi dan distribusi pendapatan (ketimpangan) yang melebar. Tulisan ini hendak fokus melihat persoalan ketimpangan, sekalipun tetap dikaitkan dengan persoalan kemiskinan sebab keduanya memiliki keterkaitan yang erat. Lessmann (2009) mengemukakan bahwa untuk mengukur ketimpangan antar daerah (interregion) dalam suatu negara ada tiga jenis pengukuran, yaitu: 1) Indikator ekonomi, yang umumnya menggunakan PDB, 2) Tingkat teritorial, untuk negara-negara Eropa umumnya menggunakan ukuran statistik unit teritorial dan di luar Eropa menggunakan ukuran perbedaan daerah, dan 3). Pengukuran konsentrasi yang biasanya menggunakan koefisien variasi, koefisien gini dan koefisien weighted-population dengan bobot nilai antara 0 - 1.

Jika dilihat dari historisnya semua negara pernah mengalami ketimpangan yang tinggi, dan ketimpangan sendiri selamanya tetap ada sepanjang negara (daerah) masih berdiri. Sekalipun demikian ketimpangan tetap diupayakan serendah mungkin, karena hal itu akan menimbulkan persoalan sosial dikemudian hari. Menurunkan ketimpangan distribusi pendapatan tidak semudah dibayangkan, menggapai penurunan nilai 0,1 saja bukan perkara gampang. Menurut hipotesis neo-klasik pada permulaan (hitungannya bukan tahunan tetapi dekade) proses pembangunan suatu negara, ketimpangan pembangunan antar wilayah cenderung meningkat atau tidak merata. Proses ini akan terjadi sampai ketimpangan tersebut mencapai titik puncak/melebar (divergence). Bila proses pembangunan terus berlanjut maka berangsur-angsur ketimpangan



Oleh :
Muh. Amier Arham

akan pembangunan antar wilayah tersebut menurun (convergence).

Umumnya negara-negara berkembang ketimpangan pembangunan antar wilayah cenderung lebih tinggi, sementara negara-negara maju cenderung rendah, atau dapat digambarkan seperti huruf U terbalik (reverse U-shape curve). Kurva U terbalik dapat diinterpretasikan sebagai relasi antara kesenjangan pendapatan dan tingkat pendapatan per kapita. Hasil ini diinterpretasikan sebagai evolusi dari distribusi pendapatan dalam proses transisi dari suatu ekonomi pedesaan (rural) ke suatu ekonomi perkotaan (urban) atau ekonomi industri. Todaro dan Smith (2006) menyebutkan kurva Kusnetz dapat dihasilkan oleh proses pertumbuhan berkesinambungan yang berasal dari perluasan sektor modern, seiring dengan perkembangan sebuah negara dari perekonomian tradisional ke perekonomian modern.

Jika mengacu pada hipotesis Kusnetz, bilamana negara (daerah) masih bertumpu atau mengandalkan sektor 'tradisional' dalam pengertian sempit pertanian non olahan, dipastikan ketimpangan sangat sulit diturunkan. Oleh sebab itu selain dibutuhkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas juga pentingnya perubahan struktur ekonomi ke sektor ekonomi modern. Disamping itu jika melihat faktor penyebab ketimpangan cukup beragam, salah satunya adalah

terkonsentrasinya kegiatan ekonomi wilayah yang mengakibatkan ketidakmerataan pembangunan antar daerah, selain itu investasi yang sangat banyak dalam proyek-proyek yang padat modal (capital intensive), sehingga persentase pendapatan modal dari tambahan harta lebih besar dibandingkan dengan persentase pendapatan yang berasal dari kerja, sehingga pengangguran bertambah.

Jika dikaitkan dengan ketimpangan distribusi cenderung masih tinggi di Gorontalo serta angka kemiskinan juga masih besar asumsinya sama dengan hipotesis Kusnetz, hal itu terlihat dari keseluruhan daerah (kabupaten) masih bertumpu pada sektor ekonomi tradisional. Kontribusi sektor tradisional (pertanian non olahan) pada triwulan ketiga 2016 mencapai 39,71 persen sementara sektor industri pengolahan (sektor modern) hanya sebesar 4,08 persen. Sementara investasi swasta masih sangat terbatas, kegiatan kewirausahaan masih kecil dan cenderung terkonsentrasi di Kota Gorontalo. Sama halnya APBD jika diakumulasi APBD Kota Gorontalo dan APBD Provinsi perputarannya lebih banyak di kota, malahan sebagian besar belanja barang dan jasa serta belanja modal di daerah perkotaan akibatnya perputaran keuangan sekitar 70 persen ada di Kota Gorontalo. Demikian halnya APBN yang dikelola oleh satuan kerja kementerian/ lembaga banyak terkonsentrasi di Kota Gorontalo, kondisi ini menambah terjadinya ketimpangan distribusi pendapatan di Gorontalo.

Sekalipun demikian ketimpangan yang terjadi tidak terlepas dari model kebijakan pemerintah yang kerap kurang tepat. Ini sejalan dengan hasil kajian yang dilakukan oleh Smeru (2005) bahwa peningkatan

ketimpangan dapat menjadi tanda yang mengingatkan kita akan kekeliruan dalam perumusan kebijakan. Dengan ketimpangan yang tinggi tentu juga akan memberikan efek terhadap sulitnya menurunkan angka kemiskinan sekalipun pertumbuhan ekonomi tinggi. Ravallion (2001) menegaskan bahwa ketimpangan yang tinggi atau meningkat akan menghambat prospek pertumbuhan ekonomi dalam menanggulangi kemiskinan. Maka dari itu kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan harus diselesaikan secara berbarengan, sebab bila hanya mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu dapat menyelesaikan kedua jenis penyakit ekonomi tersebut.

Jika mengacu dari teori dan berbagai studi empiris yang ada maka untuk menurunkan angka kemiskinan maka problem ketimpangan terlebih dahulu diselesaikan, sebab meningkatnya ketidakmerataan pendapatan akan mengurangi efektivitas pengurangan kemiskinan. Paradigma baru saat ini meyakini bahwa pembangunan harus diarahkan kepada terjadinya pemerataan (equity), pertumbuhan (efficiency), dan keberlanjutan (sustainability) yang berimbang dalam pembangunan ekonomi. Paradigma baru ini dapat mengacu kepada dalil kedua fundamental ekonomi kesejahteraan, dimana dalil ini menyatakan bahwa sebenarnya pemerintah dapat memilih target pemerataan ekonomi yang diinginkan melalui transfer, perbaikan struktur anggaran, perpajakan dan subsidi, sedangkan ekonomi selebihnya dapat diserahkan kepada mekanisme pasar yang fair, tidak ada distorsi dan monopoli.*